

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

by Abd. Rohman

Submission date: 05-Mar-2023 01:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 2029077987

File name: 7_3353-10198-2-PB.pdf (216.76K)

Word count: 2202

Character count: 14672

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

Roro Merry Chornelia¹, Noora Fithriana², Abd. Rohman³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: merry.cbornelia@yahoo.com

Received: 9 Mei 2022 | Revised: 20 Juni 2022 | Accepted: 22 Juni 2022

Abstract: Empowerment can be said as a process of building a community through capacity building and behavior change in an organization. The purposes of this research are to determine the role of rural government to empower the information group of societies in the village of Tlekung, Bumiaji, Batu; its supporting and inhibiting factors. This research used a qualitative approach to obtain the primary and secondary data. The research results determined that the Rural Government of Tlekung plays the role successfully so the group can inform many pieces of information in Tlekung by the media. To conduct the job, the Rural Government of Tlekung also gives incentives to the group and controls its activities. The supporting factor of the role of the Rural Government of Tlekung for empowering the group is a good communication style; meanwhile, the inhibiting factor is a fund that lacks to buy some media tools.

Keywords: information group; rural role; society empowerment

Abstrak: Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai suatu proses membangun masyarakat melalui pengembangan kemampuan dan perubahan perilakunya dalam suatu organisasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Desa Tlekung, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tlekung berhasil berperan dalam pemberdayaan KIM sehingga KIM dapat memberitahukan hal-hal yang sedang dan akan dilaksanakan di Desa Tlekung melalui media-media informasi. Dalam menjalankan perannya, Pemerintah Desa Tlekung juga memberikan insentif kepada KIM dan mengontrol kegiatan KIM. Faktor pendukung peran Pemerintah Desa Tlekung dalam pemberdayaan KIM adalah pola komunikasi yang baik, sedangkan faktor penghambatnya ialah kurangnya dana untuk membelikan peralatan media.

Kata Kunci: kelompok informasi; pemberdayaan masyarakat; peran desa

PENDAHULUAN

Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai suatu proses membangun masyarakat melalui pengembangan kemampuan dan perubahan perilakunya dalam suatu organisasi. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk membawa masyarakat menjadi berdaya, artinya bahwa dengan adanya pemberdayaan ini dapat menjadikan masyarakat lebih kuat, mampu, mandiri untuk mencapai tujuan pembangunan sosial (Mardikanto dan Poerwoko 2015:100), serta upaya fasilitasi yang bersifat non-instruktif untuk meningkatkan pembangunan dan kemampuan agar masyarakat mampu mengidentifikasi, merencanakan dan melakukan pemecahan masalah dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada dari LSM dan tokoh masyarakat lintas sektoral. Pemberdayaan masyarakat di desa sangat bergantung kepada pemerintah atau aparat desa. Pemerintah Desa Tlekung telah melakukan proses pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk menjadi jembatan antara pemerintah desa dengan masyarakat, terutama para remaja desa. KIM dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah (Endah, Suwarlan, dan Adityawarman, 2021). Dengan dibentuknya kelompok informasi masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan proses pemberdayaan yang jauh lebih baik untuk melaksanakan peran pemerintah desa.

Desa dengan segala macam pesonanya memberi sebuah harapan untuk mewujudkan pembangunan dari visi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Program Dana Desa yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Meskipun desa merupakan unit terkecil pemerintahan, namun mengembangkan potensinya sangat penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat agar masalah klasik perkotaan, seperti transmigrasi masyarakat desa ke kota (urbanisasi) tidak menjadi masalah yang berlarut-larut. Sehingga, sudah saatnya masyarakat desa mandiri dengan cara mengembangkan potensi desa yang ada (Sadija, 2018:10). Potensi desa tidak akan dapat berkembang tanpa adanya proses pemberdayaan masyarakat. Pendekatan konsep pemberdayaan masyarakat bertumpu pada risiko di keluarga, kebutuhan, dan hak-haknya dalam rangka menentukan prioritas dan strategi pembangunan. Permasalahan-permasalahan dalam hal pemberdayaan masyarakat ada lima, yakni tingginya tingkat kematian ibu, kurangnya gizi ibu dan anak, rendahnya tingkat dan kualitas pendidikan, munculnya psikotropika dan HIV/AIDS, serta perlunya upaya perlindungan khusus anak-anak. Memberdayakan kelompok remaja sebagai komposisi terbesar dari penduduk Indonesia merupakan intervensi yang paling strategis karena kelompok ini yang akan memasuki pasar kerja dalam pertimbangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, potensi kelompok remaja untuk menjadi pekerja yang disiplin, terampil dan fleksibel perlu dioptimalkan. Di Desa Tlekung, adanya beberapa kasus pernikahan dini pada kelompok remaja membuat pemerintah desa membentuk kelompok informasi masyarakat supaya dapat memberikan informasi dan konseling yang berkaitan dengan baik dan buruknya pernikahan usia dini tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada konsep pemberdayaan kelompok informasi masyarakat digunakan di dalam penelitian ini. Peneliti sendiri adalah instrumen kunci. Penelitian ini memperoleh data sekunder dan juga primer melalui wawancara untuk

mendapatkan keterangan lisan dari sumber informasi, observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena dengan sistematis, serta dokumentasi untuk mendapatkan data yang aktual. Untuk menganalisis data dilakukan data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data) dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Sugiyono, 2015). Dalam teknik ini, setelah data hasil penelitian direduksi, selanjutnya dilakukanlah penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

a. Peraturan pemerintah desa dalam pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

KIM dibentuk berdasarkan Surat Edaran Dinas Pariwisata yang bertujuan untuk mengembangkan semua desa yang ada di Kota Batu, termasuk Desa Tlekung. Selain itu, berdasarkan informasi, KIM ini telah dibuatkan SK (Surat Keputusan) oleh Kepala desa dan para pengurusnya juga telah dilantik. Surat-surat tersebut sebagai bentuk legalitas kelompok sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi KIM yang dijalankan oleh anggota KIM sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi dalam struktur kelembagaan yang telah ditentukan (Julika dan Puspaningrum, 2016). Pembentukan KIM Tlekung ini juga dalam rangka mengikuti program yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu. Dengan dibentuknya KIM, Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Desa Tlekung mengharapkan terjadinya banyak perubahan agar Desa Tlekung menjadi lebih baik dan maju dalam hal pertanian, peternakan, pariwisata dan informasi. Sebab, Desa Tlekung adalah akses jalan alternatif menuju ke Kota Wisata Batu.

b. Konsep pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tlekung

Pemerintah Desa Tlekung membentuk KIM sebagai cara untuk mentransformasikan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat di Desa Tlekung melalui peliputan/media yang dimiliki oleh Desa Tlekung, contohnya TV desa. Media informasi lainnya bisa melalui akun Instagram Desa Tlekung yaitu: *tlekung.official* dan *kim_tlekung*. Dibentuknya KIM dan media KIM dapat memberikan informasi kepada masyarakat Desa Tlekung. Harapannya, masyarakat dapat mengetahui hal-hal apa saja yang sedang/akan dilaksanakan di Desa Tlekung melalui media-media tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa dukungan media TIK dalam aktifitas KIM akan memudahkan transformasi informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh seluruh anggotanya, serta memberikan terpaan yang memadai bagi masyarakat sekitar (Budhirianto, 2015). Dengan demikian, media KIM dapat mempermudah masyarakat dan pemerintah untuk mengakses informasi.

c. Hak dan kewajiban Pemerintah Desa Tlekung dalam pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penerapan kegiatan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dalam pemberdayaan KIM, Pemerintah Desa Tlekung memiliki hak untuk menerima informasi dari KIM bahwa pekerjaan yang ditugaskan telah diselesaikan dengan tepat waktu. Sementara itu, kewajiban Pemerintah Desa

Tlekung dalam pemberdayaan KIM yaitu memberikan insentif yang besarnya telah ditetapkan sebelumnya, yaitu: Rp 200.000,00/ bulan untuk Ketua KIM, Rp 150.000,00/ bulan untuk Bendahara dan Sekretaris KIM, dan Rp 100.000,00/ bulan untuk Anggota KIM. Selain insentif, Pemerintah Desa Tlekung juga berkewajiban untuk memenuhi peralatan-peralatan pendukung media informasi seperti kamera.

d. Akses pelaksanaan pemberdayaan untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Akses media informasi Desa Tlekung yang dikelola oleh KIM yaitu akun Instagram dan TV desa (Tlekung TV), serta Whatsapp grup setiap RT dan RW. Melalui media-media tersebut, akses informasi yang dari Pemerintah Desa Tlekung dapat langsung tersalurkan kepada masyarakat desa karena di wilayah *rural*/ masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan informasi (Sari, 2017).

e. Partisipasi pemerintah desa dalam memberdayakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Partisipasi masyarakat desa dalam pemberdayaan KIM diberikan dalam bentuk dukungan moril dan materiil. Dukungan moril berupa keikutsertaan KIM dalam rapat-rapat atau agenda-agenda penting desa. Dukungan materiil berupa penyediaan alat-alat dan bahan-bahan oleh desa meskipun masih menyewa yang anggarannya diambilkan dana desa. Pemerintah Desa Tlekung masih berusaha untuk membeli peralatan sendiri yang dapat difungsikan oleh KIM dalam syuting dan pendokumentasian kegiatan-kegiatan desa yang selanjutnya diunggah ke akun instagram dan siaran TV lokal, sehingga dapat lebih menghemat anggaran. Dukungan ini tidak sejalan dengan masyarakat di desa-desa lainnya di wilayah Jawa Timur dimana banyak masyarakat di Desa Nglanuk dan Warurejo cenderung bersikap acuh dengan tidak ikut bergabung dalam kepengurusan KIM (Sari, 2017).

f. Kontrol Pemerintah Desa Tlekung dalam pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Cara Pemerintah Desa Tlekung dalam mengontrol KIM yaitu dengan meminta laporan setiap selesai kegiatan sehingga Pemerintah Desa Tlekung tahu penyerapan anggaran dari suatu kegiatan, serta lamanya waktu pelaksanaan suatu kegiatan. Laporan kegiatan akan langsung diberikan oleh Ketua KIM kepada Kepala Desa Tlekung untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi. Salah satu tujuan meminta laporan ialah agar mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan (Mardikanto dan Soebikanto, 2017:122).

g. Kesetaraan peran Pemerintah Desa Tlekung dalam pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Pemerintah Desa Tlekung memiliki beberapa kelompok masyarakat dalam mentransformasikan informasi yang dibutuhkan oleh desa, yaitu: PIKR, Forum Anak dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Ketiga kelompok tersebut tidak ada yang dibedakan oleh Pemerintah Desa Tlekung karena ranah kerjanya juga berbeda. Baik pemberdayaan dalam hal pendanaan dan pemberian honor, Pemerintah Desa Tlekung menyetararkannya karena setiap kelompok masyarakat bekerja sesuai kapasitasnya. KIM sebagai lembaga sosial yang diakui memiliki kepentingan, aturan, serta struktur yang dilindungi oleh negara, sehingga masing-masing kelompok perlu diberdayakan agar aktivitasnya berjalan secara berkelanjutan (Julika dan Puspaningrum, 2016).

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa Tlekung

a. Faktor Pendukung

Peran Pemerintah Desa Tlekung dalam pemberdayaan KIM didukung oleh pola komunikasi yang cukup baik diantara pemerintah desa dengan anggota KIM. Sebagai penyampai informasi, KIM harus terampil berkomunikasi agar informasi yang diterima sesuai dengan apa yang diberikan (Chernova dan Rinawati, 2016). Dengan pola komunikasi yang baik, masyarakat dapat mengetahui keberadaan dan manfaat KIM. Pembentukan KIM dapat menjadi ladang kreativitas bagi anak-anak muda, misalnya dengan membuat film-film pendek yang dilombakan di tingkat kota. Aktivitas ini dapat diakses melalui akun instagram resmi KIM Tlekung.

b. Faktor Penghambat

Peran Pemerintah Desa Tlekung dalam pemberdayaan KIM terhambat oleh dana yang kurang untuk membelikan alat pendukung media informasi seperti kamera dan lain-lain. Namun, faktor ini tidaklah terlalu mendesak karena karena alat-alat yang dibutuhkan untuk sementara ini masih dapat di³wa dari tempat persewaan. Kurang memadainya dana operasi³ kegiatan KIM dan sarana dan prasarana seperti laptop dan komputer memang menjadi penghambat pelaksanaan KIM di Jawa Timur (Kasiyanto, 2017). Oleh sebab itu, diperlukan bantuan pendanaan dan sarana³ prasarana dari Pemerintah Desa Tlekung dan Pemerintah Kota Batu karena KIM Tlekung ini merupakan mitra kerja yang sangat penting.

PENUTUP

Pembentukan KIM oleh Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Desa Tlekung mengharapkan banyak perubahan agar Desa Tlekung menjadi lebih maju dalam hal pertanian, peternakan, pariwisata dan informasi. Dalam hal pemberdayaan KIM, Pemerintah Desa Tlekung berkewajiban untuk memberikan insentif kepada pengurus KIM yang besarnya telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, Pemerintah Desa Tlekung melakukan kontrol terhadap KIM dengan cara meminta laporan setiap selesai dilaksanakannya suatu kegiatan. Faktor pendukung peran Pemerintah Desa Tlekung dalam pemberdayaan KIM ialah pola komunikasi, sedangkan faktor penghambatnya ialah kurangnya dana untuk pembelian peralatan pendukung media. Oleh karena itu, dapat disarankan agar Pemerintah Desa Tlekung memperhatikan kebutuhan media KIM dengan mengalokasikan belanjanya pada dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhirianto, S. (2015). Pola Komunikasi untuk Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Menyukkseskan Program Swasembada Pangan. *Jurnal Pekommas*, 18(2), 127-138.
- Chernova, R., & Rinawati, R. (2016). Proses Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) Sebagai Agen Informasi Kota Bandung. *Prosiding Manajemen Komunikasi ISSN*, 2460, 6532.
- Endah, K., Suwarlan, E., & Aditiyawarman, A. (2021). Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh*, 3(2), 419-426.

- Julika, S. R., & Puspaningrum, I. I. (2016). Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Mendorong Pembangunan Desa. *Public Corner*, 11(2).
- Kasiyanto, K. (2017). Implementasi Kebijakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Daerah Tertinggal di Jawa Timur dalam Penyebarluasan Informasi. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 5(2), 101-110.
- Mardikanto, T., & Poerwoko, S. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sadija, N. (2020). *Kupas Tuntas Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Pixelindo.
- Sari, R. P. (2017). Pencapaian Masyarakat Informasi Ditinjau Melalui Implementasi Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)(Studi Kasus Implementasi Program KIM di Jawa Timur di Wilayah Rural (KIM Nglanduk dan KIM Warurejo) dan Wilayah Urban (KIM Mojod dan KIM Swaraguna). *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 13(1), 56-63.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan ketiga. Jakarta: CV. Alfa Beta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	desa-sukalangu.blogspot.com Internet Source	2%
2	ejournalwiraraja.com Internet Source	2%
3	jurnal.kominfo.go.id Internet Source	2%
4	journal.pustakauinib.ac.id Internet Source	2%
5	nistyadya.blogspot.com Internet Source	1%
6	diskominfo.meranginkab.go.id Internet Source	1%
7	jdih.jatengprov.go.id Internet Source	1%
8	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	1%
9	pt.scribd.com Internet Source	1%

10	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	1 %
11	core.ac.uk Internet Source	1 %
12	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
13	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1 %
14	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
15	repositori.umrah.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off